

STUDI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DAN PAKISTAN

SEJARAH DAN PROSES PEMBUATAN

Rizki

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Abstract

Indonesia and Pakistan as two most populous Muslim countries with their geo-strategic position have a very important role in international politics. Foreign policy of both Indonesia and Pakistan, thus, becomes an important issue to be studied. This article is a simple attempt to study the foreign policy of Indonesia and Pakistan. The study is set to answer two main questions; (1) what is the history of foreign policy of Indonesia and Pakistan?; and (2) how is the process of foreign policy making in Indonesia and Pakistan? The study uses primary and secondary sources of data such as press release, text speech of policy makers, official documents of government institution, journals, books and online information (internet). The study revealed some important findings. First, that the history of Indonesian foreign policy has undergone three major phases namely foreign policy of old order era (1945-1966), foreign policy of new order era (1966-1998), and foreign policy in the aftermath of reformasi (1998-Onward). While the history of Pakistan foreign policy has undergone six major phases namely foreign policy in 1947-1954, foreign policy in 1954-1962, foreign policy in 1962-1971, foreign policy in 1971-1980, foreign policy in 1980-1990, and foreign policy in 1990-Onward. The study also revealed that fo-

Abstrak

Indonesia dan Pakistan sebagai dua negara dengan penduduk Muslim terbesar dengan posisi geo-strategis mereka memiliki peran yang sangat penting dalam politik internasional. Kebijakan luar negeri Indonesia dan Pakistan, dengan demikian, menjadi isu penting untuk dipelajari. Artikel ini adalah upaya sederhana untuk mempelajari kebijakan luar negeri Indonesia dan Pakistan. Studi ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan utama; (1) apa sejarah kebijakan luar negeri Indonesia dan Pakistan?; dan (2) bagaimana proses pembuatan kebijakan luar negeri di Indonesia dan Pakistan? Penggunaan studi primer dan sumber sekunder yang data seperti siaran pers, pidato teks pembuat kebijakan, dokumen resmi dari instansi pemerintah, jurnal, buku dan informasi online (internet). Studi ini mengungkapkan beberapa temuan penting. Pertama, bahwa sejarah politik luar negeri Indonesia telah mengalami tiga fase utama yaitu asing dari era orde lama (1945-1966), kebijakan luar negeri dari era orde baru (1966-1998), dan kebijakan luar negeri pasca reformasi (1998-seterusnya). Sementara sejarah kebijakan luar negeri Pakistan telah mengalami enam fase utama kebijakan yaitu asing di 1947-1954, kebijakan luar negeri di 1954-1962, kebi-

reign policy making process in both Indonesia and Pakistan is carried out in two ways; formal and non-formal.

Key Words: Foreign Policy, Indonesia, Pakistan, History, Policy Formulation

jakan luar negeri di 1962-1971, kebijakan luar negeri di 1971-1980, kebijakan luar negeri di 1980-1990, dan kebijakan luar ng pada tahun 1990-seterusnya. Penelitian ini juga menemukan bahwa proses pembuatan kebijakan luar negeri di Indonesia dan Pakistan dilakukan dengan dua cara; formal dan non-formal.

PENDAHULUAN

Indonesia dan Pakistan adalah dua negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk masing-masing 236.199.338 (BPS, 2010) dan 183.223.813 jiwa (Sensus, 2013). Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lokasi strategis yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan diapit oleh dua samudera dan benua. Sedangkan Pakistan terletak di kawasan Asia Selatan berbatasan dengan sejumlah negara dan kawasan strategis seperti India, Tiongkok, Afganistan dan Asia tengah. Posisi geo-strategis tersebut membuat keduanya memiliki peran dan posisi penting dalam dinamika politik kawasan dan global (Kazi, 1964).

Sebagai negara muslim berkembang yang mendapatkan kemerdekaan dari kolonial pada era 40an, baik Indonesia dan Pakistan memiliki sejumlah agenda dan kepentingan nasional yang sama dalam kancah politik global. Orientasi politik luar negeri kedua negara sama-sama didasari oleh perjuangan untuk kemerdekaan (*self-determination*) dan perlawanan terhadap penjajahan (*against colonialism*). Orientasi itu juga dibangun atas

fondasi nilai dan spirit yang hidup di masyarakat kedua negara tersebut yang bersumber pada ajaran agama Islam (Sukma, 2003).

Faktor-faktor domestik di atas memberikan kontribusi penting ke dalam kebijakan luar negeri Indonesia dan Pakistan. Dalam teori *innenpolitik* sebagai salah satu pendekatan aliran neo-realisme, diasumsikan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara sebaiknya dipahami sebagai produk dari dinamika internal negara tersebut (Rose, 1998). Artinya, untuk memahami bagaimana negara tertentu berperilaku dalam cara tertentu di tatanan politik internasional, harus terlebih dahulu menelaah kedalam bagaimana preferensi dan konfigurasi dari aktor-aktor domestik negara tersebut.

Dengan demikian, untuk memahami kebijakan luar negeri Indonesia dan Pakistan perlu memahami dengan komprehensif dinamika internal keduanya yang merupakan *input* dalam perumusan kebijakan. Hal itu dapat dilakukan dengan mempelajari sejarah kebijakan luar negeri keduanya. Artinya memahami rentetan tingkahlaku kedua negara pada konteks peristiwa-peristiwa penting dalam waktu yang cukup lama. Selain

itu, dengan mempelajari proses bagaimana kebijakan luar negeri kedua negara tersebut dirumuskan. Artinya memahami apa dan siapa yang turut berpengaruh dan berperan penting dalam merumuskan kebijakan.

Atas dasar paparan di atas, kajian ini akan dibatasi dengan fokus pada sejarah dan proses pembuatan atau formulasi kebijakan luar negeri Indonesia dan Pakistan. Kajian ini akan menjawab beberapa pertanyaan bagaimana sejarah kebijakan luar negeri Indonesia, bagaimana sejarah kebijakan luar negeri Pakistan, bagaimana proses pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia, bagaimana proses pembuatan kebijakan luar negeri Pakistan.

METODE PENELITIAN

Sejatinya sebuah kajian tentang kebijakan dua negara akan lebih baik menggunakan metode komparatif atau perbandingan dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Namun, kajian ini lebih bersifat deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan yaitu dengan menyajikan penjelasan sejarah dan proses pembuatan kebijakan dengan utuh dan apa adanya. Sehingga dalam kajian ini tidak dijelaskan dengan rinci apa persamaan dan perbedaan kebijakan luar negeri antara kedua negara tersebut.

Sumber data pada kajian ini bersifat primer dan sekunder. Sumber primer pada kajian kebijakan luar negeri bisa berupa *press release*, naskah pidato pengambil kebijakan, dokumen resmi instansi terkait baik pemerintah maupun non-pemerintah, dll. Sedangkan sumber sekunder berupa jurnal, buku, atau

informasi berbasis internet. Sebagian besar data yang digunakan dalam kajian ini bersifat sekunder yaitu yang bersumber dari jurnal, buku dan informasi berbasis internet. Hal ini disebabkan keterbatasan akses terhadap sumber primer.

SEJARAH KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA

Fondasi dan Prinsip

Prinsip dasar kebijakan luar negeri Indonesia dikenal dengan istilah kebijakan 'bebas dan aktif'. Prinsip ini dirumuskan dalam konteks perjuangan anti-penjajahan di benua Asia-Afrika dan permulaan era perang dingin antara blok Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet (Soviet) dimana saat itu Indonesia lahir. Sebagai negara baru, Indonesia harus memastikan bahwa Belanda dan Jepang tidak berpetualang kembali ke bumi nusantara ini. Selain itu, mengambil sikap memihak kepada salah satu blok juga tidak menguntungkan kepentingan nasional Indonesia. Atas dasar itu, kebijakan luar negeri bebas dan aktif di-kedepankan.

Sejarahnya, kebijakan bebas aktif ini pertamakali disampaikan oleh Muhammad Hatta, wakil Presiden pertama dan pendiri bangsa, dalam sebuah pidato di hadapan KNIP dengan judul '*Mendajung Antara Dua Karang*', di Jogjakarta pada 2 September 1948. Hatta berargumentasi bahwa daripada memilih pro AS atau Soviet, Indonesia justru harus merancang sebuah kebijakan luar negeri yang lebih positif dan konstruktif sebagai alternatif. Selain itu, kebijakan memihak

juga tidak menguntungkan kepentingan Indonesia dan juga komunitas internasional (Hatta, 1976).

Gagasan dasar lainnya yang turut menahkodai arah kebijakan luar negeri Indonesia telah dituangkan dalam paragraf pertama dan ke-empat dari pembukaan UUD tahun 1945. Dalam paragraf pertama, Indonesia berkomitmen kuat untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan. Sedangkan paragraf ke-empat mengamanatkan Indonesia untuk aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dengan berdasarkan keadilan sosial dan kemerdekaan (Singadilaga dalam Wicaksana, 2006).

Fase-Fase Utama Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Sejak kemerdekaannya, Indonesia telah mengalami berbagai fase dan pola kebijakan luar negeri yang berbeda. Beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Era Orde Lama (1945-1966)

Kebijakan luar negeri era Soekarno atau sering disebut sebagai orde lama, dapat dikatakan cukup radikal, diwarnai dengan peranan Soekarno yang *self-styled* sebagai pemimpin revolusi dari negara berkembang. Kebijakan luar negeri Indonesia pada fase ini dipengaruhi oleh pengalaman dalam mengamankan kemerdekaan dari Belanda dalam sebuah perjuangan bersenjata dan jugakepentingan untuk menjaga independensi dalam sebuah tatanan dunia yang diwarnai

kompetisi antara dua blok negara adidaya (Dahm, 1969).

Pada era ini kebijakan luar negeri Indonesia dapat dipahami dalam dua konteks peristiwa penting. Pertama, penyelenggaraan konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955 sebagai bentuk konkrit dari gerakan non-blok (*Non-alignment movement*) negara-negara di Asia dan Afrika. Kedua, retorika anti-kolonial Soekarno yang semakin *assertive*, khususnya dalam menolak pembentukan Federasi Malaysia pada 1963 yang dikenal dengan konfrontasi Malaysia. Hal ini membuat tensi negara-negara tetangga Indonesia atau pun kawasan Asia Tenggara memanas termasuk Australia.

Dalam perjalanannya, Soekarno telah membawa arah kebijakan luar negeri Indonesia pada haluan kiri dengan poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Pyongyang-Pekong. Hal ini membuat Indonesia pada posisi tidak baik dengan seluruh negara-negara barat dan berujung pada keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB (Wahyudi, 2007).

2. Era Orde Baru (1967-1998)

Era kepemimpinan Soeharto yang dimulai pada tahun 1966 menggantikan Soekarno dikenal sebagai orde baru. Dibawah Soeharto Indonesia tidak lagi mengambil posisi *assertive* kecuali pada beberapa kasus seperti Papua. Pada awal kekuasaannya, Soeharto lebih fokus kepada pembangunan kondisi ekonomi

negara yang morat-marit dengan jalan menggalang bantuan internasional seperti kelompok negara donor dari barat yang tergabung dalam *the Inter-government Group on Indonesia*. Selain itu, ia juga menitikberatkan pada agenda membangun kembali kerjasama dan stabilitas kawasan dengan mendirikan Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) pada 1967. Dengan langkah-langkah itu, Soeharto telah membawa sebuah pendekatan kawasan dalam kebijakan luar negeri Indonesia (Suryadinata, 1998).

Pada pertengahan 1980an, Indonesia berhasil mengambil posisi kunci di ASEAN. Pertumbuhan ekonomi yang baik telah turut memberikan Indonesia kepercayaan diri untuk kembali memainkan peranan di kancah internasional. Hal ini dilakukan dengan berbagai langkah seperti bergabung dengan Forum Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada 1989. Selain itu, Soeharto juga kembali menghidupkan gerakan non-blok setelah berakhirnya perang dingin dengan merubah orientasinya kepada kerjasama ekonomi dan pembangunan. Misalnya saja pada 1992 Indonesia berhasil menjadi tuan rumah konferensi gerakan non-blok dan terpilih menjadi ketuanya sampai tahun 1995.

Disamping sejumlah prestasi, kebijakan luar negeri era Soeharto juga diwarnai oleh sejumlah isu negatif seperti pelanggaran HAM yang memancing reaksi keras dari komunitas internasional seperti konflik Aceh (GAM), Papua, pen-

culikan aktifis, dll. Isu korupsi dan kolusi yang melitbakkan keluar terdekat dan kroni-kroninyaya juga turut mencoreng Indonesia di muka internasional. Menjelang akhir masa kepemimpinannya Indonesia mendapat citra buruk dari komunitas internasional khususnya negara-negara barat, sebagai negara dengan rejim otoriter.

3. Pasca Reformasi

Krisis finansial Asia pada 1997 telah menguncang perekonomian Indonesia. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi merosot tajam yang diwarnai dengan meroketnya harga-harga komoditas membuat keadaan domestik Indonesia tidak stabil. Di hadapan dengan kondisi ekonomi yang memburuk serta muak akan tatakelola pemerintahan yang korup dan otoriter membuat masyarakat dengan dimotori oleh mahasiswa menuntut perubahan menyeluruh pada pemerintah, dikenal sebagai reformasi. Mulanya Soeharto merespon tuntutan itu dengan defensif. Namun, gelombang penolakan semakin besar dan meluas. Lalu Soeharto menawarkan sebuah reformasi terbatas dengan membentuk kabinet reformasi dan berjanji akan mengakomodir tuntutan masa. Namun menyadari usahanya tidak membuahkan hasil, Soeharto akhirnya menyerah kepada tuntutan masa. Pada Mei 1998, Soeharto resmi melepaskan kepresidenan setelah 32 tahun menguasai tahta itu dengan meninggalkan sejumlah pekerjaan berat untuk penggantinya.

Setelah Soeharto jatuh, menurut konstitusi Habibie sebagai wakil Presiden secara otomatis diangkat menjadi Presiden. Pada era Habibie pemerintah lebih disibukan oleh isu-isu domestik. Beberapa agendanya adalah menanggulangi krisis ekonomi, mengawal transisi politik dan mengembalikan kepercayaan publik. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Habibie lebih fokus pada upaya mendapatkan dukungan internasional untuk proses demokratisasi dan pemulihan ekonomi. Misalnya dengan menggandeng negara-negara donor dan IMF.

Isu lain yang sangat penting pada era ini adalah kebijakan tidak populis Habibie menggelar referendum di Timor Timur yang berbuah pada lepasnya provinsi itu menjadi negara merdeka. Hal ini pula yang membuat laporan pertanggungjawaban Habibie ditolak oleh parlemen. Secara umum, orientasi kebijakan luar negeri Habibie mengadopsi *low profile stance*. Masa pemerintahan Habibie merupakan masa transisi yang berlangsung cukup singkat.

Setelah pemilu pertama pasca reformasi digelar pada tahun 1999, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai Presiden. Meskipun pada era kepemimpinannya, diwarnai oleh sejumlah konflik komunal dan isu tatakelola pemerintahan yang kontroversial, Gus Dur bersikeras mengadopsi *a high behavior abroad*. Selama menjabat 21 bulan, Gus Dur telah melakukan kunjungan luar negeri ke lebih kurang 90 negara. Tentu langkah itu memantik banyak kritik tajam dari dalam negeri.

Meskipun banyak kritik terhadap kebijakan luar negerinya yang dianggap tidak ko-hesif dan tidak memiliki orientasi yang jelas. Namun, Gus Dur berhasil melakukan beberapa perubahan penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Belajar dari krisis ekonomi 1997, Gus Dur dengan cerdas membangun kembali hubungan yang lama membeku dengan Tiongkok dan beberapa negara besar (*emerging powers*) sebagai alternatif dari barat yang terbukti sebagai partner yang tidak bisa diandalkan, meninggalkan Indonesia di-saat krisis (FRUS, 2001).

Kepemimpinan Gus Dur tidak lah mulus, bahkan harus berhenti ditengah jalan dengan mekanisme *impeachment* di parlemen. Sisa masa jabatannya dilanjutkan oleh Megawati yang saat itu sebagai wakil-Presiden. Pada era Megawati, yang menggantikan Gus Dur pada 2001, kebijakan pemerintah lebih fokus pada stabilitas politik dan ekonomi. Megawati mengarahkan kebijakan luar negerinya kepada upaya membangun kerjasama ekonomi dengan pihak asing/luar, dan terlibat aktif dalam berbagai kerjasama bilateral, regional dan internasional. Megawati berkomitmen untuk membangun kerjasama dengan sebanyak-banyak pihak internasional khususnya dengan mereka yang dapat membantu Indonesia dalam proses *recovery*. Diujung pemerintahannya, Megawati berhasil menyelenggarakan pemilu Presiden dan Wakil-Presiden secara langsung pada tahun 2004 (Ratnawati, 2006).

Pemilu Presiden dan Wakil-Presiden secara langsung mengantarkan Susilo Bam-

bang Yudhoyono (SBY), seorang jenderal ahli strategi menjadi Presiden. Rancangan kebijakan luar negeri pemerintahan SBY dengan cermat ia rumuskan sebagaimana ia sampaikan dalam orasinya di *Indonesian Council on World Affairs (ICWA)* pada Mei 2005. Gagasan utamanya adalah membaca ulang prinsip dasar kebijakan 'bebas dan aktif', yang diletakan para pendiri bangsa, kemudian menerapkannya dalam dunia kontemporer. Dalam menggambarkan gagasan utama kebijakan luar negerinya, SBY menggunakan metafora menavigasi di samudra berombak, *navigating in a turbulence ocean* (Yudhoyono, 2005).

SBY menterjemahkan kebijakan 'bebas dan aktif' kedalam sejumlah panduan umum dan praktis. Pertama, pendekatan konstruktif, artinya kebijakan independen harus dibarengi pola pikir konstruktif seperti kemampuan merubah lawan menjadi kawan, dan kawan menjadi *partner*. Kedua, bebas dan aktif, artinya Indonesia tidak akan masuk kedalam pakta/alianse militer manapun. Ketiga, konektifitas, artinya untuk aktif Indonesia harus terlibat atau berpartisipasi secara sehat dalam isu regional dan global. Keempat, prinsip dasar tadi harus diorientasikan untuk memproyeksikan *image* internasional Indonesia. Terakhir, kebijakan bebas dan aktif, harus merefleksikan *brand* nasionalisme Indonesia yang terbuka, moderat, toleran dan *outward looking*.

Selama 10 tahun pemerintahannya, SBY melakukan berbagai upaya untuk merealisasikan rancangan kebijakan yang ia buat. Di dalam negeri, ia dinilai relatif sukses dalam

menyelesaikan sejumlah pekerjaan besar. Ekonomi Indonesia tumbuh dengan sehat dengan angka pertumbuhan mencapai 6.5 persen (GDP). Agenda reformasi ia jalankan dengan memerangi korupsi dan menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik. SBY juga dinilai sukses dalam menyelesaikan konflik Aceh yang telah lama menggerogoti kesatuan negara. Sejumlah keberhasilan domestik itu, membuat Indonesia semakin percaya diri untuk tampil dalam kancah internasional.

Berkaitan dengan kebijakan luar negerinya, SBY berkomitmen untuk menstransformasi ASEAN menjadi organisasi kawasan yang lebih tangguh dan produktif. Hal itu dengan melihat fakta bahwa sejak satu dekade terakhir ASEAN telah menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi Asia. Indonesia juga berhasil menjadi anggota G20 sebagai salah satu bukti pengakuan dunia internasional atas posisi strategisnya. Secara umum, meskipun kebijakan luar negeri SBY lebih nampak berorientasi global, namun lebih berbasis pada dan dipacu oleh pendekatan kerjasama kawasan dengan menjadikan ASEAN sebagai *focal point*-nya.

PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN DI INDONESIA

Proses formulasi kebijakan luar negeri di Indonesia secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua mekanisme; formal dan non-formal. Formulasi formal adalah berhubungan erat dengan seleksi secara cermat dari sejumlah pilihan kebijakan (*policy choices*) dalam institusi pemerintah (*govern-*

ment set-up). Sedangkan formulasi kebijakan non-formal adalah berkaitan erat dengan masukan-masukan dari publik (*public inputs*) kepada pemerintah baik itu dalam bentuk tuntutan, aspirasi dan kritik melalui berbagai saluran atau kanal.

1. Proses Formulasi Formal

Indonesia menerapkan bentuk pemerintahan Presidensial. Dengan demikian, konsep pembagian kekuasaan menjadi landasan logika pembentukan kerangka kerja pemerintahannya. Kekuasaan eksekutif diejawantahkan dan sepenuhnya diserahkan kepada Presiden sebagai kepala pemerintah dengan dibantu menteri-menterinya dalam kabinet (meskipun istilah kabinet lazimnya digunakan dalam bentuk pemerintahan parlementer, namun istilah ini familiar di Indonesia). Pada saat yang bersamaan Presiden juga kepala negara dan simbol dari persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Sedangkan kekuasaan legislatif diejawantahkan dalam sebuah lembaga perwakilan. Yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari dua kamar; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kedua organ pemerintah tersebut adalah yang memiliki kewenangan dalam formulasi formal kebijakan luar negeri Indonesia.

Sebagai kepala negara dan juga pemerintahan sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi, Presiden adalah pusat dari proses pembuatan atau formulasi kebijakan luar negeri. Dia lah organ pemerintah yang otoritatif dan *legitimate* untuk membawa nama Indo-

nesia keluar atau di kancah internasional. Semua inisiatif dan pilihan kebijakan luar negeri secara teoritis dirumuskan dan diputuskan oleh Presiden.

Di era pasca reformasi, Presiden tidak lagi berada dalam posisi yang sangat menentukan sebagaimana terjadi di masa lalu (era orde lama dan baru). Presiden harus dipaksa berbagi sejumlah perannya dengan organ legislatif. Hal itu disebabkan oleh perubahan iklim dan hakikat struktur politik domestik yang membuka peluang semakin banyaknya aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. sehingga pada akhirnya, membuat keseluruhan rangkaian proses formulasi tersebut menjadi lebih kompleks.

Dalam pelaksanaan tatakelola pemerintahan sehari-hari, para menteri dalam kabinet juga memainkan peranan yang penting melalui proses konsultasi terkoordinasi di antara sejumlah menteri dan pejabat kunci diantaranya menteri luar negeri, menteri perdagangan, menteri pertahanan dan panglima TNI. Menteri luar negeri adalah pejabat yang secara khusus menjalankan semua hubungan luar negeri dan bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden (kecuali pada beberapa kasus atau isu yang penanganannya diserahkan pada menteri terkait seperti, menteri perdagangan, ekonomi/keuangan, dan pertahanan). Sedangkan panglima TNI, sekalipun tidak berkaitannya langsung dalam merumuskan kebijakan luar negeri, namun dalam prakteknya memiliki peran dan fungsi yang sangat penting khususnya berkaitan dengan kebijakan pertahanan dan kemanan

serta dapat memberikan masukan kepada Presiden secara langsung.

Lembaga legislatif, dalam hal ini DPR, melalui komisi I yang bertanggungjawab dan berwenang dalam isu-isu pertahanan dan luar negeri memiliki peran yang terbatas. Fungsi utamanya adalah memberikan umpan-balik (*feedback*) dan dukungan kepada pemerintah melalui mekanisme dengar pendapat (*Hearing*), hak angket (*Questioning*), dll. Fungsi utama lainnya dari DPR dalam proses formulasi kebijakan luar negeri adalah pembuatan perundang-undangan terkait. Barangkali ini adalah mekanisme yang lebih efektif dan penting yang dimiliki oleh DPR dalam ikut serta merumuskan kebijakan. Namun, produk-produk legislatif yang berkaitan dengan isu kebijakan luar negeri secara alamiah sangatlah terbatas. Legislatif hanya menjalankan tugas untuk meletakkan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, dikenal sebagai *rules of business*. Ketika pedoman tersebut telah selesai dibuat, maka pada prakteknya urusan ini sepenuhnya ada di tangan eksekutif, yaitu Presiden dan kabinetnya.

2. Formulasi Non-Formal

Dengan bergulirnya reformasi dan pada gilirannya pembentukan kerangka pemerintahan yang demokratis (*Democratic set-up*) di Indonesia, maka isu-isu hubungan dan kebijakan luar negeri tidak lagi menjadi isu elitis seperti dulu. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menuntut pemerintah untuk berba-

gi informasi dan bahkan kewenangan dalam perumusan kebijakan luar negeri dengan publik. Akibatnya, banyak aktor yang tertarik dan memiliki kepentingan dalam kebijakan luar negeri sekarang turut terlibat dalam proses perumusannya, langsung ataupun tidak. Peranan media masa dalam membentuk opini publik sebagai salah satu pilar demokrasi juga memiliki signifikansi yang besar dalam proses ini. Sedangkan aktor penting lainnya yang secara non-formal mempengaruhi proses perumusan kebijakan luar negeri adalah kalangan akademis berupa *think tank*, organisasi kemasyarakatan (*pressure group*), komunitas bisnis (*interest group*), dll.

Aktor-aktor di atas sebagai infrastruktur politik, merupakan saluran komunikasi efektif antara pemerintah dan rakyat dalam proses formulasi/perumusan kebijakan. Dalam banyak kasus di Indonesia, organisasi kemasyarakatan yang didominasi oleh organisasi keagamaan, banyak berperan dalam memobilisasi sentimen dan gerakan publik terhadap isu-isu luar negeri sehingga mempengaruhi sikap pemerintah dalam mengambil kebijakan. Misalnya saja isu-isu sensitif berbaur agama seperti kasus kemerdekaan Palestina dan/atau sentimen anti Amerika dimainkan dengan efektif oleh organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dll.

Begitu pula dengan komunitas bisnis seperti yang tergabung dalam Kamar Dagang Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara anggota G20 dan dianggap sebagai kandidat *emerging economy* setelah Tiongkok, India dan Brazil, menjadikan ekonomi dan per-

dagangan sebagai salah satu misi kebijakan luar negerinya. Hal ini terbukti dari kebijakan pemerintah yang telah bergabung dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement/FTA*). Kondisi ini jelas menempatkan komunitas bisnis sebagai salah satu aktor penting dalam proses perumusan kebijakan luar negeri.

SEJARAH KEBIJAKAN LUAR NEGERI PAKISTAN

Fondasi dan Prinsip

Fondasi kebijakan luar negeri Pakistan sejak dini telah diletakkan oleh tokoh pendirinya, Muhammad Ali Jinnah. Dalam pidato/orasi yang ditujukan kepada sejumlah perwakilan asing dan komunitas internasional (khususnya AS dan Australia melalui radio) pada 1947, Jinnah merumuskan sejumlah tujuan dari kebijakan luar negerinya. Utamanya adalah persahabatan dengan semua, promosi perdamaian dan stabilitas, dukungan untuk kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah, and kepatuhan terhadap prinsip-prinsip aturan internasional (*International Conduct*) sebagaimana ditungkan dalam piagam PBB (Rizvi, 2004).

Disamping itu, prinsip-prinsip lain dalam kebijakan luar negeri Pakistan secara mendalam mengakar pada peninggalan sejarah dan peradabannya yang kaya dan tua. Sebagai sebuah negara yang lahir dengan *rationale* nasionalisme agama (Islam) dan mengatasmakan kepentingan *Ummat* di anak benua India, Pakistan sangat berkomitmen untuk menjalin hubungan yang erat dengan se-

buah negara muslim. Bayang-bayang partisi dengan dan ketakutan oleh ancaman India serta pengalaman penjajahan yang tidak menyenangkan dari Inggris, membuat Pakistan secara konsisten mengadopsi kebijakan anti kolonialisme dan mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas khususnya di benua Asia-Afrika (Sattar, 2007).

Fase-Fase Utama Kebijakan Luar Negeri Pakistan

Selama kurun waktu 67 tahun kemerdekaannya Pakistan telah melalui pelbagai tantangan dalam dunia internasional dan pada gilirannya mengalami sejumlah fase kebijakan dinataranya:

1. Kebijakan Luar Negeri pada 1947-1953

Orientasi utama kebijakan luar negara fase awal adalah memastikan pengakuan komunitas internasional atas hak kemerdekaan Pakistan dan bertahan dari upaya India yang mengancam eksistensinya. India sekalipun secara formal telah mengakui Pakistan, namun harapan dan opini bahwa bahwa Pakistan akan kembali bergabung sangatlah kuat. Itu merupakan pemahaman umum di kalangan pengambil kebijakan di Pakistan tentang skenario India (*Indian Desgin*). Oleh karena itu, Pakistan merasa perlu untuk memastikan *a peaceful coexitence* dengan India. Perhatian Pakistan akan hal itu bertambah kuat dengan pecahnya krisis India-Pakistan yang dimulai dari perang India-Pakistan tentang isu Kashmir

pada 1947, dan krisis pada 1950 dan 1951 (Burke, 1990).

Skenario perang dingin antara AS dan Soviet merupakan karakter dominan sistem internasional pasca perang duini II (PDII). Dalam kondisi seperti itu, Pakistan berusaha mengambil sikap netral dalam persaingan antara dua adidaya itu. Meskipun memiliki posisi tawar yang tidak strategis, Pakistan berhasil menjalin hubungan dengan Amerika dan Soviet masing-masing pada 1948 dan 1949 (Rizvi, 1990).

Sebagai negara yang lahir dengan gagasan dua bangsa atau nasionalisme yang berbeda yang tidak dapat disatukan yaitu muslim dan hindu anak benua India (*two nation theory*), sejak awal Pakistan sangat berkomitmen untuk menjalin hubungan erat dengan negara-negara muslim. Komitmen itu diterjemahkan dalam berbagai langkah seperti menyelenggarakan dan menjadi tuan rumah berbagai konferensi Islam internasional. Dengan harapan mendapat dukungan dunia Islam dan juga menciptakan persatuan di antara negara-negara muslim sebagai satu ummat. Namun kebijakan ini dianggap tidak membuahkan hasil maksimal. Bahkan sejumlah pemimpin negara muslim merespon inisiatif Pakistan dengan negatif (Burke, 2007).

2. Kebijakan Luar Negeri pada 1954-1962

Eksistensi Pakistan sebagai negara merdeka saat itu secara langsung dikaitkan dengan sikap India. Dengan kata lain, ancaman dari India dan isu pertahanan dan keamanan

menjadi batu pijakan kebijakan luar negeri Pakistan. Berbagai upaya hubungan dengan India untuk menciptakan konsensus tentang *peaceful coexistence* pada masa-masa awal, telah membuat Pakistan pesimis. Meskipun krisis tahun 1950 dan 1951 tidak berlanjut kepada perang terbuka, akan tetapi itu telah meninggalkan trauma mendalam pada Pakistan. Atas dasar itu, para pemimpin Pakistan berkomitmen untuk mencari negara alternatif yang mampu menjamin keamanan Pakistan setelah upaya mendapatkan hal itu dari negara-negara muslim gagal.

Tekad bulat di atas membuat Pakistan harus memilih di antara blok komunis atau blok barat. Dan blok barat yang dipimpin Amerika Serikat menjadi pilihan yang rasional bagi Pakistan untuk menjawab permasalahannya. Pada pertengahan 1950an Pakistan resmi bergabung dengan blok barat dengan menjadi anggota dalam empat pakta penting yang diinisiasi AS. Pakistan bergabung dengan SEATO (South East Asian Treaty Organization/Perjanjian Organisasi Asia Tenggara) pada tahun 1945 dan CENTO (Central Treaty Organization/Perjanjian Organisasi Tengah) pada tahun 1955. Pakistan juga menjadi anggota di pakta Bagdad, yang diinisiasi oleh Irak dan Turki dengan sokongan AS. Yang terakhir tapi mungkin yang paling penting adalah pakta pertahanan Pakistan dan AS yang ditandatangani pada tahun 1959 dimana AS akan menjamin keamanan Pakistan dari serangan blok komunis Soviet (Sattar, 2007).

3. Kebijakan Luar Negeri pada 1962-1971

Kebijakan luar negeri Pakistan pada fase ini dikenal dengan sebuah fase transisi. Para pengambil kebijakan di Pakistan mulai meninjau kembali keberpihakan mereka kepada blok barat AS. Rasio keuntungan dan kerugian dari keberpihakan itu nampak tidak seimbang untuk kepentingan Pakistan. Dengan bergabung dengan blok barat, Pakistan menderita kerugian berupa hubungan yang tidak baik dengan negara-negara muslim yang mayoritas berada dalam gerakan non-blok. Pakistan juga menjalani hubungan yang buruk dengan Soviet dan Tiongkok yang merupakan negara tetangga. Pakistan digambarkan sebagai kaki tangan barat atau AS.

Terlepas dari berbagai konsekuensi di atas, terdapat beberapa perkembangan penting yang turut berpengaruh pada fase ini. Pertama, insiden pesawat mata-mata AS, U-2, pada tahun 1960 telah menunjukkan kerapuhan keamanan Pakistan bila blok komunis Soviet melakukan serangan. Kedua, perang Sino-India pada tahun 1962 memaksa Pakistan untuk meninjau kembali aliansinya dengan blok barat. Selain itu, makin kuatnya posisi penting India di mata AS dalam konteks kebijakan menahan komunis Tiongkok (*Containing policy*), telah menyebabkan keresahan pihak Pakistan. ketiga, terus menerus bantuan militer yang diberikan AS kepada India meskipun Pakistan berulang kali menyampaikan protes dan keberatan, telah membuat Pakistan prustasi. Kesemuanya itu

membuat Pakistan keluar dari keberpihakan kepada blok barat.

4. Kebijakan Luar Negeri pada 1971-1979

Orientasi kebijakan luar negeri Pakistan pada fase ini diwarnai oleh satu konteks utama yaitu krisis Pakistan bagian timur yang kemudian memisahkan diri menjadi negara merdeka, Banglades. Dalam situasi yang sangat kritis tersebut, Z. A. Bhutto mengambil tampuk kepemimpinan dan merumuskan kebijakan luar negerinya dengan cermat. Tujuan dan arah kebijakan luar negeri Pakistan saat itu adalah; (i) membangun kembali kepercayaan negara-negara sahabat dan moral rakyat Pakistan; (ii) menjaga hubungan dengan negara-negara adidaya; (iii) mengikis akibat-akibat buruk dari krisis 1971; (iv) membangun hubungan dengan pemerintah dan rakyat Banglades; (v) mendapatkan bantuan asing dan internasional; dll (Bhutto: 2000).

Untuk mencapai tujuan itu, Bhutto mengambil sejumlah langkah penting seperti melakukan kunjungan ke 20 negara muslim yang ia sebut sebagai sebuah misi kebangkitan dalam hubungan dengan negara-negara muslim (*a mission of renaissance*). Pakistan juga keluar dari keanggotaan persemaikmuran (*commonwealth*) dan SEATO pada 1972. Secara singkat, kebijakan luar negeri Pakistan pada fase ini adalah re-orientasi menuju bilateralisme dan non-blok.

5. Kebijakan Luar Negeri pada 1980-1990

Intervensi militer Soviet ke Afganistan pada 27 Desember 1979 adalah sebuah faktor dominan dalam mengubah skenario global pada umumnya dan kebijakan luar negeri Pakistan pada khususnya. Geo-strategis Pakistan tak ayal membuatnya sebagai satu-satunya pilihan utama negara-negara Barat dan dunia Islam untuk menghentikan intervensi Soviet tersebut. Kawin kepentingan antara duni muslim dan barat, dalam hal ini Amerika serta sekutunya, yang menentang langkah Soviet itu berbuah pada sejumlah kebijakan diantaranya. Mobilisasi gerakan jihad global melawan komunis Soviet yang diserukan kepada ummat. Fasilitasi dana dan senjata yang dilakukan AS dengan sekutunya. Kedua kebijakan menempatkan Pakistan sebagai ujung tombaknya. Sebagai konsekuensi, Pakistan kembali mendapat uluran tangan hangat dari AS beserta sekutunya dan negara-negara muslim (Amin, 2000). Kesempatan itu dieksploitasi oleh Pakistan dengan baik dengan cara menanamkan pengaruh yang besar dalam urusan dalam negeri Afganistan. Hal ini dilakukan karena kepentingan Pakistan yang melihat Afganistan sebagai sebuah *strategic-depth* dalam perang konvensional dengan India.

6. Kebijakan Luar Negeri pada 1990an

Pada fase ini arah kebijakan luar negeri Pakistan dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, berakhirnya perang dingin dengan jatuhnya Soviet. Kedua, uji-coba senjata nuklir

India pada 11 dan 13 Mei 1998 yang kemudian direspon oleh Pakistan dengan melakukan tes nuklir pada 28 Mei tahun yang sama. Sebagai konsekuensi posisi tawar Pakistan bagi AS dan sekutunya tidak lagi penting. Sejumlah bantuan dan kebijakan lunak pro Pakistan di AS mengalami perubahan drastis. Pakistan harus menghadapi garapan AS yang belum selesai di Afganistan. Kemudian, perubahan sasaran para veteran jihad Afgan kepada isu Kashmir juga menjadi dinamika tersendiri buat Pakistan.

Menghadapi itu semua arah kebijakan luar negeri Pakistan pada fase ini diwarnai oleh orientasi kepada regionalisme atau kerjasama kawasan. Hal itu dilakukan dengan pemahaman bahwa Pakistan perlu mendapat dukungan baru dalam menyelesaikan tantangan di atas. Sebagai langkah konkritnya, Pakistan mengadakan sejumlah forum kerjasama kawasan.

PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN DI PAKISTAN

Seperti halnya di Indonesia, pembuatan kebijakan di Pakistan juga dapat diklasifikasikan ke dalam dua mekanisme; formal dan non-formal. Proses pembuatan kebijakan formal tentunya berkaitan dengan sistem politik dan pemerintahan (*Government set-up*). Kebijakan luar negeri sebagai sebuah kekuasaan eksekutif berada di tangan organ eksekutif. Berdasarkan konstitusi setidaknya ada tiga badan eksekutif yang terlibat langsung dalam perumusan kebijakan luar negeri, yaitu Presiden sebagai kepala Negara, Perdana

Menteri (PM) sebagai kepala pemerintahan, dan kabinet utamanya menteri-menteri yang berhubungan dengan isu-isu luar negeri.

1. Proses Formulasi Kebijakan Formal

Menurut konstitusi Pakistan Pasal 90, sebagai kepala negara, Presiden adalah pejabat otoritatif dalam formulasi kebijakan luar negeri Pakistan. Namun, Pasal 48 memberikan penjelasan lanjut bahwa Presiden harus bertindak sesuai dengan dan terikat oleh masukan (*Advice*) dari PM dan kabinetnya dalam menjalankan fungsinya tadi. Sehingga dalam prakteknya kewenangan dan fungsi kebijakan luar negeri banyak dilakukan oleh PM dan kabinetnya (Husain, 2004).

Menteri luar negeri (Menlu) adalah aktor kunci dalam berbagai kebijakan atau isu terkait hubungan luar negeri. Namun, karena PM pada prakteknya dapat melakukan fungsi ini sendiri atau didelegasikan ke menlu, maka menlu menjadi orang no 2 dalam daftar aktor pembuat kebijakan. Namun, tidak semua kebijakan luar negeri dikelola oleh menlu, ada sejumlah isu yang diserahkan pada menteri terkait seperti perdagangan, pertahanan, dll.

Salah satu isu paling penting dalam formulasi kebijakan luar negeri di Pakistan adalah pertahanan dan keamanan (*Defense and Security*). Keamanan sudah menjadi faktor utama dan determinan dalam kebijakan luar negeri Pakistan. Dengan demikian, agensi/institusi keamanan dan intelijen memiliki peranan dominan dalam formulasi kebijakan. Memang nyatanya, menlu di Pakistan banyak dibayang-bayangi oleh institusi militer (Jalal,

1990). Panglima TNI atau pun KASAD dapat memberi rekomendasi dan bahkan memberi tekanan Presiden atau PM terkait kebijakan luar negeri khususnya yang berhubungan dengan pertahanan, militer dan kemanan.

Peran dan posisi dominan institusi militer dan intelijen dalam perumusan kebijakan luar negeri Pakistan dapat dipahami dalam beberapa faktor. Pertama, secara umum militer di Pakistan merupakan institusi pemerintahan yang memiliki basis kekuasaan dan pengaruh keseluruhan lapisan dan elemen masyarakat. Kedua, militer di Pakistan memang dapat dinilai sebagai satu-satunya institusi pemerintahan dengan pola kerja dan sistem komando yang jelas dan baik. Instabilitas politik dan ekonomi memuat hampir semua institusi pemerintah sipil tidak berfungsi dengan baik. Sehingga tidak berlebihan bila kemudian militer di Pakistan disebut sebagai negara dalam negara (Cohen, 2005).

Bentuk pemerintahan parlementer sejatinya memberi ruang luas untuk legislatif dalam perumusan kebijakan. Hal itu karena diasumsikan bahwa PM dan kabinetnya bertanggungjawab langsung kepada parlemen. Kebijakan yang salah atau kontra-produktif dapat mengakibatkan mosi tidak percaya di parlemen yang berujung pada jatuhnya kabinet. Pada banyak kasus, PM dan kabinetnya di Pakistan harus terlebih dahulu mengkomunikasikan arah kebijakan luar negerinya di depan sidang parlemen sebelum mengeksekusi kebijakan itu. Bahkan tidak jarang isu-isu luar negeri/internasional memancing anggota parlemen untuk mengadakan dengar penda-

SIMPULAN

Pembahasan di atas menyodorkan sejumlah temuan penting yang dapat dijadikan sebagai simpulan dari kajian ini. Pertama, sejarah kebijakan luar negeri Indonesia telah melawati tiga fase penting dengan orientasi berbeda; (i) era Soekarno (1945-1966) diwarnai oleh ciri kebijakan yang *high profile stance* dengan orientasi utama anti-kolonial dan Barat serta manuver gerakan non-blok dengan basis negara-negara Asia-Afrika; (ii) era Soeharto (1966-1998) diwarnai oleh orientasi kebijakan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, membangun kembali kerjasama dengan Barat, dan penguatan kawasan dengan pendirian ASEAN; (iii) era pasca reformasi (1998-2014) diwarnai oleh pemulihan ekonomi dan stabilitas politik, kerjasama perdagangan bebas, dan penguatan kerjasama kawasan dengan menransformasi ASEAN menjadi organisasi yang lebih tangguh dan produktif.

Kedua, sejarah kebijakan luar negeri Pakistan telah melawati enam fase penting dengan orientasi berbeda; (i) fase 1947-1953 dengan orientasi kebijakan mendapatkan pengakuan komunitas internasional atas kemerdekaannya dan bertahan dari upaya pencaplokan kembali oleh India dengan mengusung kebijakan *peaceful coexistence*; (ii) fase 1954-1962 yang diwarnai oleh kebijakan bergabungnya Pakistan ke dalam blok barat dan AS; (iii) fase 1962-1971 yang diwarnai oleh keluarnya kembali Pakistan dari blok barat dan AS; (iv) fase 1971-1989 yang diwarnai oleh peristiwa memisahkan dirinya

bagian timur Pakistan menjadi negara merdeka Banglades, sehingga kebijakan disorientasi pada pemulihan moral rakyat, image Pakistan di mata internasional, dan hubungan dengan Banglades; (v) fase 1980-1990 yang diwarnai oleh peristiwa perang Afganistan dengan arah kebijakan luar negeri menggalang dan mengkapilatisasi dukungan Barat dan dunia Islam; (vi) fase 1990an yang diwarnai oleh peristiwa keberhasilan uji-coba nuklir India dan kemudian nuklir Pakistan sebagai respons dengan arah kebijakan luar negeri yaitu menciptakan stabilitas dan kerjasama kawasan.

Ketiga, proses pembuatan kebijakan di Indonesia dan Pakistan dilakukan dengan cara; formal dan non-formal. Proses formulasi formal melibatkan organ pemerintahan yang berwenang. Pada kasus Indonesia Presiden dibantu menternya khususnya menteri luar negeri, perdagangan, pertahanan dan panglima TNI, memiliki peran dominan dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Sedangkan pada kasus Pakistan, Presiden dan Perdana menteri beserta kabinetnya yang berperan dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Namun, pada banyak kasus pihak militer sebagai faktor diterminan dalam kebijakan luar negeri sangat mendominasi.

Sedangkan dalam proses formulasi non-formal, di Indonesia media masa, organisasi masyarakat (*pressure group*) seperti NU dan Muhammadiyah, dan organisasi kepentingan (*interest group*) seperti KADIN memainkan peran yang relatif seimbang dalam memberikan *input* kebijakan luar negeri. Sedangkan

di Pakistan proses formulasi non-formal didominasi oleh organisasi masyarakat atau partai politik berbasis agama dan tuan tanah (*landlords*) sebagai elemen utama kekuatan politik masyarakat Pakistan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Sayed Salahuddin, 1996. *Foreign Policy of Pakistan: a Critical Study*, Karachi: Comprehensive Books Service.
- Aziz, K. K, 2001. *Pakistan's Political Culture: Essay in Historical and Social Origins*, Vanguard Book (Pvt) Ltd, Lahore.
- Burke, S, M, and Lawrence Ziring, 1990. *Pakistan's Foreign Policy: A Historical Analysis*, Karachi, Oxford University Press, (Second Edition).
- Bhutto, Zulfikar Ali, 2000. *Foreign Policy of Pakistan, A Compendium of Speeches Made in the National Assembly of Pakistan 1962-64*, SaniPanhwar.
- Cohen, Stephen Philip, 2005. *The Idea of Pakistan*, Vanguard Book (Pvt) Ltd, Lahore.
- Dahm, Bernhard, 1969. *Sukarno and the struggle for Indonesian independence*. Translated from the German by Mary F. Somers Heidhues. Ithaca, N.Y: Cornell University Press.
- FRUS, 2001. Foreign Relations of the United States (1964-68). Vol. 26: Indonesia, Malaysia Singapore, Philippines. Washington, D.C.: United States Government Printing.
- Hatta, Muhammad, 1976. *Mendajung Diantara Dua Karang*.
- Husain, Javid, 2004. *The Process of foreign Policy Formulation in Pakistan*, Pildat 12.
- Jalal, Ayesha, 1990. *State of Martial Rule: The Origins of Pakistan's Political Economy of Defense*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Kazi, S. Ahmed, 1964. *A Geography of Pakistan*, Karachi/Lahore: Oxford University Press.
- Malik, Hafeez, 2001. *Pakistan: Founders Aspirations and Today's Realities*, Oxford University Press, Karachi: Pakistan.
- Ratnawati, Tri, 2006. *Potret Pemerintahan di Indonesia di Masa Perubahan: Otonomi Daerah Tahun 2000 - 2006*, Yogyakarta-Jakarta: PustakaPelajardan P2P-LIPI.
- Rose, Gideon, 1998. *Review: Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy*, Cambridge University Press.
- Rizvi, Hasan Askari, 2004. *Pakistan's Foreign Policy; an Overview*, Pildat 11.
- Sattar, Abdul, 2007. *Pakistan's Foreign Policy 1947-2005: Concise History*, Oxford.
- Sukma, Rizal, 2003. *Islam in Indonesia Foreign Policy*, London and New York: Routledge Curzon.
- Suryadinata, Leo, 1998. *Politik LuarNegeri Indonesia di Bawah Soeharto*, Jakarta: LP3ES.
- Wahyudi, Yayan, 2007. *Change and Continuity in Indonesia's Foreign Policy*, Centre for Strategic Studies.
- Wicaksana, I Gede Wahyu, 2006. *The Nature of Indonesia's Foreign Policy*, CakraStudi Global- Strategis.
- Yudhoyono, Susilo Bambang, 2005. *Indonesia and the World*, ICWA.
- www.census.gov.pk
- www.bps.go.id